

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Baihaqi

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

The objective of this research is to know original region income contribution againsts region income, component of original region income contribution (such as region tax, region fee, the result of manajement natural wealth, and the other of original region income) against total original region income and region income. Then also to know about growing rate original region income and region income in Bengkulu Province. The data used was secondary data which get from the result of research in Dispenda Bengkulu Province for the period of 2005-2008.

The result of research shows in table and narrative which show that average original region income againsts region income in Bengkulu Province period 2005-2008 is 29.86%. The average of original region income contribution about total original region income contribution as in a regular other is region tax 69.48%, region fee 18.25%, the result of manajement natural wealth 3.03%, and the other of original region income 9.24%. And then the average of original region income contribution about region income as in a regular other is region tax 20.51%, region fee 5.56%, the result of manajement natural wealth 0.91%, and the other of original region income 2.88%. Where as a whole the acceptance of this sector must be increased to get a maximum advantage in increasing the region income in Bengkulu Province. Finally, growing rate of original region income and region income in Bengkulu Province for the period of 2005-2008 is 23.96% and 51.38%.

Keywords : Region Income, Original Region Income, Contribution, and Growing Rate

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita nasional, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah bedasarkan visi dan misi, melakukan berbagai program dalam rangka penciptaan good governance dan pembangunan nasional. Berbagai indikator untuk mewujudkan agenda good governance dan pembangunan yang merata

diantaranya: akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Provinsi Bengkulu hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara profesional. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik (Putry, 2008).

Semenjak reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang kepada pemerintah daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan sesuai dengan urusan pemerintah (Darise, 2009). Hal ini merupakan wujud nyata dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan otonomi yang luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sepuan, 2008).

Dalam pasal (1) ayat (5) dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (desentralisasi). Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dibidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan dilain pihak dibukanya peluang bagi pemerintah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah (Setyawan, 2004). Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam, kemampuan mengelolah keuangan daerah, kondisi social budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen (Halim, 2004).

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistiyorini, 2004).

Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu Tahun 2008, bahwa untuk tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu telah berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp287,732,324,054.00 dari target sebesar Rp322,037,372.,853.00 atau sebesar 89.35%. Prestasi tertinggi dalam pencapaian target PAD berasal dari sektor pajak daerah yaitu sebesar Rp214,208,995,375.00. Artinya secara keseluruhan sektor pajak daerah ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 74.45% dari jumlah PAD secara keseluruhan. Jumlah ini meningkat 45,35% jika dibandingkan dengan tahun 2007 (DPRD Provinsi Bengkulu, 2009).

Seiring dengan bertambahnya potensi pajak provinsi yang bersumber dari kendaraan bermotor dan pajak pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, diharapkan jumlah pendapatan daerah juga akan meningkat. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu yang menjadi obyek pajak daerah dimana jumlah terbesar adalah sepeda motor yang berjumlah 163.495 kendaraan. Sedangkan penerimaan dari bea balik nama kendaraan sebanyak 58.150 kendaraan (Tim Ekonomi Moneter, 2009).

Dari data diatas, terlihat adanya peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Namun permasalahannya adalah seberapa besar PAD beserta komponen didalamnya (seperti: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah) dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi daerah, maka pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber- sumber penerimaan PAD tersebut.

Putry (2008) tentang Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Dispenda Kota Bengkulu. Hasil penelitian adalah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang cukup besar terhadap PAD Kota Bengkulu. Tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2003-2007 adalah sebesar 29,93% dan 19,32%, sedangkan tingkat pertumbuhan PAD adalah 22,72%. Kesimpulannya adalah adanya perbaikan keuangan Kota Bengkulu yang berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perkiraan PAD Kota Bengkulu akan meningkat seiring dengan peningkatan potensi yang ada di wilayah ini.

Bedasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada objek dan tahun penelitian, yaitu PAD, komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain- lain PAD yang sah) dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2005-2008. Oleh karena itu peneliti akan meneliti: “**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu (Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu)**”.

1.2 Rumusan masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah:

- 1) Berapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu?
- 2) Berapa besar tingkat kontribusi komponen PAD (seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD di Provinsi Bengkulu?
- 3) Berapa besar tingkat kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu?
- 4) Berapa besar tingkat pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu?

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu (Halim, 2004). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan.

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pendapatan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber pendapatan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel non-ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 4) Pinjaman Daerah.

2.2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah selama belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Kemudian Halim (2004), yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan untuk meningkatkan kekayaan daerah. Selain itu, yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001): 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah., 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah., 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan, 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.3. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004, Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

3. METODE RISET

3.1 Metode Seleksi dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data penelitian yang digunakan adalah Pendapatan Daerah, PAD, dan komponen PAD seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan secara keseluruhan yang ada di Provinsi Bengkulu, yang bersumber dari data laporan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu dengan periode tahun 2005-2008.

3.2 Pengukuran dan Definsi Operasional Variable

Untuk lebih jelasnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang didapat dari sumber PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah selama periode tertentu.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersal dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut bedasarkan peraturan daerah.

- 3) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah imbalan langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- 4) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 6) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.
- 7) Kontribusi adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat berdasarkan laporan APBD yang dikelola Dipenda Provinsi Bengkulu dalam persentase setiap tahun anggaran 2005-2008.
- 8) Pertumbuhan adalah perkembangan yang ditunjukkan dari PAD dan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2005 – 2008.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu

Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Analisis Kontribusi Komponen PAD Terhadap PAD Di Provinsi Bengkulu

Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD terhadap PAD, dengan rumus:

$$X = \frac{P_y}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah/ Retribusi Daerah/ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Lain-lain PAD yang sah.

3) Analisis Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Daerah Di Provinsi Bengkulu

Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$X = \frac{Py}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Jumlah kontribusi yang diberika

Py : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah/ Retribusi Daerah/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Lain-lain PAD yang sah.

4) Analisis Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Di Provinsi Bengkulu

a. Pertumbuhan PAD

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD dalam periode 5 tahun penelitian, yaitu 2005-2008. Dengan rumus:

$$G = \frac{\text{PAD}(t) - \text{PAD}(t-1)}{\text{PAD}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G : Tingkat pertumbuhan PAD

PAD(t) : Jumlah PAD tahun sekarang

PAD(t-1) : Jumlah PAD tahun sebelumnya

b. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD dalam periode 5 tahun penelitian, yaitu 2005-2008. Dengan rumus:

$$G = \frac{\text{TPD}(t) - \text{TPD}(t-1)}{\text{TPD}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G : Tingkat pertumbuhan TPD

TPD(t) : Jumlah TPD tahun sekarang

TPD(t-1) : Jumlah TPD tahun sebelumnya

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

**Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
Periode 2005-2008**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	379,121,926,980.00	414,848,973,422.62	109.42
2.	2006	577,247,527,309.00	564,861,226,308.43	97.85
3.	2007	669,322,480,619.34	667,283,498,117.43	99.69
4.	2008	1,498,154,832,416.00	1,333,518,892,692.03	89.01

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Realisasi Pendapatan Daerah Povinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang terealisasi berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2005-2008 menunjukkan persentase yang bervariasi. Periode 2005-2008 pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan daerah berturut-turut sebesar 109.42%, 97.85%, 99.69%, dan 89.01%.

Besarnya persentase yang ditunjukkan untuk periode tahun 2005 merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Bahkan besarnya realisasi dari pendapatan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005 lebih besar daripada target yang telah ditetapkan, yaitu 109.42%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2005 ini pemerintah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara persentase yang terkecil adalah tahun 2008 yaitu sebesar 89.01%.

Tabel 2

**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu
Periode 2005-2008**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	125,021,176,980.00	153,512,163,267.62	122.79
2.	2006	172,920,108,978.00	172,597,535,983.09	99.81
3.	2007	202,644,315,023.77	202,216,966,538.77	99.79
4.	2008	322,037,372,853.00	287,732,324,054.03	89.35

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Pada Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu periode

2005-2008, menunjukkan bahwa untuk tahun 2005-2008 besarnya persentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 122.79%, 99.81%, 166.90%, dan 89.36%. Data di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi tertinggi dan paling memuaskan adalah di tahun 2005 yaitu sebesar 122.79%. Sementara persentase realisasi yang paling rendah adalah tahun 2008 yaitu 89.35%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dispenda Provinsi Bengkulu Periode 2005-2008 bahwa penerimaan PAD berdasarkan komponen- komponennya menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi ekonomi masyarakat Provinsi Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini:

a Pajak Daerah

Tabel 3
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
Periode 2005-2008

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	101,845,560,680.00	94,906,191,901.20	93.19
2.	2006	105,791,758,593.00	118,014,485,691.00	111.55
3.	2007	132,139,436,386.00	148,144,910,226.00	112.11
4.	2008	210,462,526,951.00	214,208,995,375.00	101.78

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah realisasi pajak daerah dari tahun 2005-2008 selalu mengalami peningkatan. Meskipun pada awal tahun yaitu tahun 2005 tidak seluruh target terealisasi. Tahun 2005-2008 besarnya persentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 93.19%, 111.55%, 112.11%, dan 101.78%. Persentase realisasi pajak daerah tertinggi adalah pada tahun 2007 sebesar 112.11%, sedangkan terendah adalah pada tahun 2005 sebesar 93.19%.

b Retribusi Daerah

Tabel 4
Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu
Periode 2005-2008

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	15,437,411,300.00	32,110,534,437.00	208.00
2.	2006	38,306,985,885.00	32,052,463,224.00	83.67
3.	2007	37,654,387,440.00	37,268,524,410.00	98.98
4.	2008	42,416,648,000.00	43,400,652,666.00	102.32

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Pada Tabel 4 Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008, menunjukkan persentase realisasi pada tahun 2005-2008 berturut-turut adalah 208.00%, 83.67%, 98.98%, dan 102.32%. Adanya penurunan persentase realisasi yang cukup drastic pada tahun 2005-2006, yaitu dari 208.00% menjadi 83.86%. Kemudian untuk tahun 2007-2008 persentase ini kembali meningkat walaupun peningkatan tidak sebesar pada tahun 2005, yaitu 98.98% menjadi 102.32%. Namun secara keseluruhan penerimaan dari retribusi daerah dari tahun 2005-2008 selalu mengalami peningkatan sebesar Rp32,110,534,437.00 menjadi Rp43,400,652,666.00.

Tabel 5

**Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Provinsi Bengkulu Periode 2005-2008**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	3,171,200,000.00	4,087,183,503.42	128.88
2.	2006	4,276,440,000.00	4,620,305,202.82	108.04
3.	2007	9,282,170,197.77	8,520,061,691.77	91.79
4.	2008	7,475,804,787.00	7,443,689,264.44	99.57

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berturut-turut adalah 128.88%, 108.04%, 91.79%, dan 99.57%. Tahun 2005 merupakan persentase yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 128.88%, sedangkan persentase terendah adalah di tahun 2007 yaitu sebesar 91.79%.

Tabel 6

**Target Dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Provinsi Bengkulu
Periode 2005-2008**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2005	4,567,005,000.00	22,408,253,390.00	490.66
2.	2006	24,544,924,500.00	17,910,281,865.27	72.97
3.	2007	23,568,321,000.00	8,283,470,211.00	35.15
4.	2008	61,682,393,115.00	22,678,986,748.59	36.77

Sumber: Hasil Penelitian 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Provinsi Bengkulu periode

2005-2008, menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah periode 2005-2008 berturut-turut adalah 490.66%, 72.97%, 35.15%, dan 36.77%. Persentase tertinggi adalah di tahun 2005 sebesar 490.66%. Sedangkan terendah di tahun 2007 sebesar 35.15%.

4.1 Pembahasan

4.1.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2005-2008. Pada tahun 2005 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 37.00%, sementara tahun 2006 sebesar 30.56%. Kemudian pada tahun 2007 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi 30.30%. Sementara tahun 2008 tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terjadi penurunan cukup drastis menjadi 21.58%.

Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah kurang focus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2008 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar daripada PAD Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar Rp515,704,176,275.00. Dana ini berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari hibah pemerintah pusat dan lembaga atau badan lain dalam negeri, serta dari penerimaan pembiayaan daerah.

Jika dilihat dari data tahun terakhir yaitu tahun 2008, pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai belum mampu menjalankan pemerintahnya sendiri. Hal ini terbukti bahwa dalam hal pendanaan keuangannya saja pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim yaitu sebesar Rp287,732,324,054.03 sementara dana suntikkan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp515,704,176,275.00.

Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara

keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata persentasi kontribusinya yaitu sebesar 29.86%. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah provinsi Bengkulu. Kenyataan ini berarti berbeda dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah.

Hal ini merupakan persoalan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah harus dapat memecahkan persoalan ini dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Provinsi Bengkulu (misalnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah) sehingga mampu memberikan kontribusi yang makin besar terhadap Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah agar Provinsi Bengkulu menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

4.1.2 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Total PAD

a. Pajak Daerah terhadap Total PAD

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Awal tahun 2005 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 61.82%, tahun 2006 sebesar 68.38%, tahun 2007 sebesar 73.26%, dan tahun 2008 sebesar 74.45%.

b. Retribusi Daerah terhadap Total PAD

Retribusi daerah merupakan sumber PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Adapun sektor dari retribusi daerah berdasarkan data dari Dispenda Provinsi Bengkulu ini adalah:

- Retribusi jasa umum,
- Retribusi jasa usaha, dan
- Retribusi perizinan tertentu.

Sementara tahun 2007 persentase turun kembali menjadi 18.43%. Namun secara nominal jumlah retribusi daerah tahun 2007 secara keseluruhan meningkat yaitu sebesar Rp37,268,524,410.00. Peningkatan nominal ini berasal dari sektor retribusi jasa umum sebesar Rp34,524,647,358.00. Selain itu sektor retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu juga memberikan kontribusinya masing-masing sebesar Rp 2,733,652,052.00 dan Rp10,225,000.00. Tahun 2008 jumlah penerimaan nominal retribusi daerah meningkat sebesar Rp43,400,652,666.00 namun tingkat kontribusinya terhadap PAD turun menjadi 15.08%. Penurunan tingkat persentase kontribusi tahun 2005-2008 ini disebabkan karena kenaikan nominal retribusi daerah tidak sebanding dengan kenaikan nominal PAD secara keseluruhan.

Jika dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2005-2008, berdasarkan persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bengkulu masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu 2005-2008 adalah sebesar 18.25%. Akan tetapi secara keseluruhan besarnya nominal retribusi daerah yang terealisasi selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2005 sebesar Rp32,110,534,437.00 kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi Rp43,400,652,666.00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Total PAD

Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak banyak memberikan kontribusi terhadap PAD. Adapun penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari:

- Bagian laba perusahaan milik daerah, dan
- Bagian laba dari lembaga keuangan.

Penerimaan pada tahun 2005 sebesar Rp4,087,183,503.42 atau sebesar 128.88% dari target Rp3,171,200,000.00. Jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 2.66%. Penerimaan ini bersumber dari bagian laba lembaga keuangan daerah yaitu Bank Bengkulu. Untuk tahun 2006, nominal penerimaan sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp4,620,305,202.82 dan kontribusinya untuk PAD sebesar 2.68%. Sementara sumber penerimaan masih tetap berasal dari Bank Bengkulu. Pada tahun 2007, penerimaan dari sektor ini adalah yang paling besar Rp8,520,061,691.77 dari tahun lainnya, persentase kontribusinya terhadap PAD 2007 adalah 4.21%. Kemudian tahun 2008 penerimaan turun menjadi Rp7,443,689,264.44. Seiring pula dengan penurunan jumlah PAD sehingga kontribusinya untuk PAD adalah 2.59%. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama periode 2005-2008 adalah sebesar 3.03%.

Pemerintah kurang berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan ini merupakan sumber penerimaan untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hal ini terlihat dari masih banyak sekali perusahaan daerah maupun lembaga keuangan daerah yang belum membayarkan iuran kepada pemerintah (Dispenda) Provinsi Bengkulu. Untuk itu upaya dalam mengkoordinasi BUMD ini harus lebih ditingkatkan agar sektor ini lebih banyak memberikan kontribusi terhadap PAD.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Total PAD

Jumlah penerimaan dari sektor Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2005-2006 menunjukkan persentasi yang biasa saja. Tahun 2005 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 14.60%. Sementara tahun 2006 penerimaan sebesar Rp17,910,281,865.27 dengan besar kontribusi 10.38%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah iuran

yang diberikan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, yang totalnya mencapai hampir Rp140,000,000.00.

Pada tahun 2007 jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah ini mengalami penurunan sebesar Rp8,243,470,211.00 . Dimana jumlah ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 4.10% terhadap total PAD. Selain itu penyebab lainnya terjadi penurunan ditahun 2007 ini adalah karena perekonomian di Provinsi Bengkulu sempat mengalami penurunan sehingga sumber penerimaan dari sektor ini (seperti: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito) pun mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2008 pemerintah berhasil menaikkan jumlah penerimaan sebesar Rp 22,678,986,748.59 dengan besar kontribusi sebesar 7.88%. Sementara rata-rata tingkat kontribusi lain- lain PAD yang sah terhadap total PAD adalah sebesar 9.24%.

4.1.3 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Daerah

a. Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Pada tahun 2005 penerimaan dari sektor pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 22.88% terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Tahun 2005 ini merupakan persentasi kontribusi yang terbesar yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan daerah. Penerimaan pajak daerah secara nominal selalu menunjukkan peningkatan, akan tetapi peningkatan ini belum menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sektor keuangan terbesar bagi daerah. Pada tahun 2005 penerimaan sebesar Rp94,906,191,901.20 memberikan kontribusi 22.88% terhadap Pendapatan Daerah.

Jumlah nominal penerimaan pajak daerah di tahun 2006 meningkat menjadi Rp118,014,485,691.00 dengan kontribusi 20.89%. Jika dilihat dari tabel diatas, besarnya nominal penerimaan dari pajak daerah selalu mengalami peningkatan Rp148,144,910,226.00 di tahun 2007 dan Rp214,208,995,375.00 di tahun 2008. Akan tetapi peningkatan yang terjadi disektor pajak daerah ini tidak seimbang dengan besarnya peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan. Persentase kontribusi ini mengalami penurunan 22.88% menjadi 16.06%. Penyebab kecilnya persentase kontribusi dari pajak daerah ini adalah karena besarnya jumlah iuran yang masuk kesektor pajak daerah lebih kecil dari jumlah iuran yang masuk kesektor lainnya yang merupakan bagian dari pendapatan daerah. Misalnya dari dana hibah dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

jika dilihat rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah selama periode 2005-2008 adalah sebesar 20.51%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bengkulu masih sangat lemah dalam hal pendanaan daerah. Pemerintah

masih sangat bergantung oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahannya.

Pemerintah hendaknya melakukan berbagai terobosan yang lebih dapat menarik perhatian masyarakat agar sadar dan mau membayar pajak. Seperti misalnya dengan mempermudah pelanggan (masyarakat) dalam pengurusan dan administrasi balik nama kendaraan bermotor atau dengan memberikan potongan dari biaya balik nama kendaraan bermotor tersebut. Selain itu dapat juga dengan memberikan sanksi kepada pelanggan yang tidak membayarkan atau terlambat waktu dalam pembayaran pajak kendaraannya. Dengan demikian berangsur-angsur penerimaan dari sektor pajak daerah akan meningkat dan pada akhirnya diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.

b. Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Kenaikan penerimaan retribusi daerah terjadi hingga tahun 2008 yaitu dari Rp32,110,534,437.00 menjadi Rp43,400,652,666.00. Begitupun dengan pendapatan daerah yang selalu mengalami peningkatan dari Rp414,848,973,422.62 hingga Rp1,333,518,892,692.03. Kenaikan retribusi ini tidak dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah sehingga rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah selama periode 2005-2008 adalah sebesar 5.56%. Tabel dibawah ini t dapat dilihat selalu terjadi penurunan persentase kontribusi dari 7.74% ditahun 2005 turun menjadi 3.25% ditahun 2008.

Pada awal tahun 2007, besarnya penerimaan Rp37,268,524,410.00. Kenaikkan penerimaan ini hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 4.64% terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2008 retribusi daerah memberikan sumbangan/ kontribusi terkecil yaitu sebesar 3.25%, dimana sebelumnya pada tahun 2005 retribusi daerah sempat memberikan kontribusinya sebesar 7.74%. Persentase selalu mengalami penurunan dari tahun 2005-2008 yaitu dari 7.74 menjadi 3.25%. Penyebab penurunan ini adalah karena besarnya kenaikan jumlah penerimaan dari sektor retribusi ini tidak seimbang dengan besarnya kenaikan pendapatan daerah secara keseluruhan, sehingga persentasenya dari tahun ke tahun terlihat semakin menurun. Hal ini seakan mengindikasikan bahwa retribusi semakin tidak ada perannya dalam peningkatan pendapatan daerah.

Untuk dapat meningkatkan peranan retribusi daerah bagi pendapatan daerah, pemerintah harus dapat melakukan berbagai cara dan strategi yang baik. Diantaranya adalah meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana, dan pelayanan kepada masyarakat (publik), memberantas banyaknya pungutan liar yang dapat merugikan rakyat. Selain itu perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan untuk dapat mengawasi jalannya proses pemungutan

retribusi tersebut karena mungkin saja dana retribusi ini diselewengkan oleh pihak-pihak pelaksana pemungutan retribusi sehingga dana retribusi yang masuk ke kas daerah menjadi sangat kecil.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah

Persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun selama periode 2005-2008 selalu mengalami penurunan, hanya di tahun 2007 sempat terjadi peningkatan kontribusi yaitu sebesar 1.06%. Namun hal ini tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 2008 persentase mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,56%.

Secara nominal penerimaan dari sektor ini memang mengalami peningkatan. Awalnya pada tahun 2005 sebesar Rp4,087,183,503.42 dengan kontribusi 0.99% menjadi Rp8,520,061,691.77 di tahun 2007 dengan kontribusi 1.28%. Namun pada tahun 2008 total penerimaan mengalami penurunan kembali menjadi Rp7,443,689,264.44.

Sementara di tahun 2008 besarnya total penerimaan sebesar Rp7,443,689,264.44 dimana memberikan kontribusi sebesar 0,56%. Besarnya persentase ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang besarnya 1,28%. Minimnya jumlah nominal realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini membuat rata-rata tingkat kontribusinya hanya sebesar 0.91%.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Hal yang sama ditunjukkan oleh sektor Lain-lain PAD yang sah. Awal tahun 2005 kontribusi hanya sebesar 5.40%, 3.17% di tahun 2006, turun menjadi 1.24% di tahun 2007 dan 1.70% di tahun 2008. Pada tahun 2008 terlihat bahwa adanya kenaikan jumlah nominal pendapatan daerah yang cukup besar yaitu Rp 1,333,518,892,692.03. Sementara kenaikan jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah tidak begitu berarti untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Minimnya penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah semakin membuat kecilnya rata-rata kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu hanya sebesar 2.88%.

Untuk dapat mengatasi persoalan minimnya penerimaan sektor ini, pemerintah perlu mengadakan evaluasi dan study kasus kelapangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sumber penerimaan sektor Lain-lain PAD yang sah. Seperti misalnya berkaitan dengan penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll. Kerjasama yang baik antar Dinas/Biro/Badan pemungut PAD, perusahaan, dan masyarakat juga perlu dibina agar proses dapat berjalan seimbang dan akhirnya penerimaan dapat ditingkatkan.

4.1.4 Tingkat Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah

PAD rata-rata tingkat pertumbuhan selama periode 2005-2008 adalah sebesar 23.96%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2008 sebesar 42.29%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 12.43%. Kenaikan tingkat pertumbuhan ini seiring dengan kenaikan total penerimaan PAD selama periode 2005-2008 yaitu dari Rp153,512,163,267.62 menjadi Rp287,732,324,054.03.

Rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah selama periode 2005-2008 adalah sebesar 51.38%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terletak pada tahun 2008 yaitu sebesar 99.84%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terletak pada tahun 2007 yaitu sebesar 18.13%. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2008 ini disebabkan karena pemerintah daerah pada saat itu mendapatkan suntikkan dana dari Pemerintah Pusat berupa pendapatan hibah yang jumlahnya sebesar Rp515,704,176,275.00.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah: 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 adalah 29.86%. Artinya PAD Provinsi Bengkulu belum begitu berperan dalam pendapatan daerah. Hal ini berbeda dengan teori yang ada yang mengatakan bahwa PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi pendapatan daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus terus berupaya untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan PAD minimal sebesar 40% hingga 50% sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah. Dengan peningkatan jumlah PAD ini diharapkan agar pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan untuk melaksanakan pemerintahannya., 2) Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah: pajak daerah 69.48%, retribusi daerah 18.25%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.03%, dan lain- lain PAD yang sah 9.24%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor pajak daerah telah sangat berperan bagi total PAD sementara retribusi daerah masih perlu untuk ditingkatkan lagi karena retribusi ini merupakan sumber PAD terbesar kedua setelah pajak daerah. Begitupun dengan penerimaan dari sektor lainnya juga masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi., 3) Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing: pajak daerah 20.51%, retribusi daerah 5.56%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0.91%, dan lain- lain PAD

yang sah 2.88%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing penerimaan dari sektor-sektor ini masih harus ditingkatkan lagi agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bengkulu., 4) Tingkat pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah 23.96% dan 51.38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih harus ditingkatkan lagi terutama untuk penerimaan PAD. Tujuan utamanya adalah untuk perbaikan kondisi keuangan di Provinsi Bengkulu.

5.2 Implikasi

- 1) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas SDA yang didukung dengan sarana dan prasarana yang telah ada. Seperti meningkatkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata serta meningkatkan sarana akses pemasaran baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDA ini maka penerimaan daerah juga akan meningkat.
- 2) Selain itu kualitas SDM juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan untuk pengelolaan SDA yang lebih baik dan kesadaran akan penciptaan lingkungan kerja yang bersih dari penyelewengan dana untuk kas daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memulihkan kondisi keuangan di Provinsi Bengkulu.
- 3) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Seperti dengan memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak, meningkatkan pelayanan, menertibkan berbagai kendaraan bermotor Non BD yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain itu pemerintah perlu menggali sumber- sumber baru penerimaan sektor retribusi daerah, melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan, dan mengevaluasi penerimaan retribusi secara berkelanjutan. Kemudian untuk meningkatkan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah adalah dengan cara selalu berkoordinasi dengan perusahaan BUMD maupun dengan Dinas/Biro/Badan pemungut PAD, dan sebagainya.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Beberapa keterbatasan ini diantaranya: 1) Belum menggunakan data primer

berupa wawancara lebih lanjut., 2) Periode yang diteliti hanya 2005-2008., 3) Pengolahan data hanya menggunakan analisis kontribusi dan analisis tingkat pertumbuhan.

5.4 Saran

Agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik maka diharapkan: 1) Menambah dengan data primer yaitu berupa wawancara lebih lanjut dengan pengelola pendapatan daerah mengenai upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bengkulu., 2) Periode yang diteliti hendaknya lebih dari periode yang telah diteliti atau dapat melakukan penelitian dengan periode terbaru., 3) Ada kemungkinan alat analisis lain yang lebih lengkap untuk melihat pertumbuhan PAD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan atau dengan menganalisis lebih mendalam tentang penyebab fluktuasi pertumbuhan PAD dan upaya konkrit dalam meningkatkan PAD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan, Drs, Ak, M.Si, (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Indeks.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Provinsi Bengkulu (2009). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu*. Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamesah, D. J., (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Mardiasmo dan Makhfath, Ahmad, (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM*. Yogyakarta.
- Nataluddin, (2001). *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN. Putry,
- Putry, Nurrahmah, (2008). *Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Bengkulu*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta: Diperbanyak Koperasi Primer Prajamukti I Departemen Dalam Negeri.
- *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sepuan, (2008). *Optimalisasi Kinerja Badan Pengawasan Provinsi Bengkulu Untuk Menunjang Terciptanya Good Governance Di Provinsi Bengkulu*. Tesis tidak

dipublikasikan. Surabaya. Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Setyawan, Dharma, (2004). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya. Jakarta: Djambatan.

Sulistiyorini, Nety Retnaningdiah. 2006. Analisis penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2000-2003. Artikel. <<http://www.google.com>>.

Suparmoko, (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2005. Bandung: Diperbanyak PT. Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2005. Bandung: Diperbanyak PT. Citra Umbara.

Tim Ekonomi Moneter-Kelompok Kajian, Statistik, dan Survei (2009) Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Bengkulu. Bank Indonesia Bengkulu.